



Relevansi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dalam Konteks Ekonomi Modern

Devi Fitri Zuya*, Nurul Aini, Marsya Pratiwi Br Nasution, Nur Afifah Nabila, M. Khadafi Harza, Fitri Hayati

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: devifitrizuya@gmail.com*, naini5897@gmail.com, marsyapратиwi1306@gmail.com,
nurafiqahnabila08@gmail.com, khadafiharza@gmail.com, fitrihayati@uinsu.ac.id

Abstract. *Ibn Khaldun is recognized as a prominent Muslim thinker who made significant contributions to the fields of economics, sociology, and politics. In his seminal work Muqaddimah, he introduced economic ideas that were far ahead of his time, including the concepts of national wealth, wage theory, market mechanisms, and the role of the state in fiscal policy. This study aims to examine the core economic thoughts of Ibn Khaldun and their relevance to current economic dynamics. Using a qualitative descriptive approach based on literature review, the study finds that many of Khaldun's ideas remain highly relevant, particularly regarding the importance of productivity, fiscal justice, and the integration of social and economic aspects in building a sustainable system. Most people know that Ibn Khaldun is one of the most famous Muslim thinkers, and he did a lot in the fields of politics, economics, and sociology. In his monumental work, Muqaddimah discusses various long-established economic concepts, such as the market mechanism, wage theory, national wealth, and the role of the state in fiscal policy. The purpose of this research is to study Ibn Khaldun's ideas on economics and evaluate how these impact contemporary economic developments. The study found that many of Khaldun's ideas are still relevant today thanks to the use of descriptive qualitative methodology based on literature study. A sustainable and inclusive economic system relies on the idea of productivity as the source of economic growth, fiscal justice in the taxation system, and integration between social and economic aspects. The results show that classical economic thought not only has historical value, but also offers solutions to many modern economic problems such as inequality, productivity stagnation, and institutional crisis.*

Keywords: *Ibn Khaldun, Islamic economics, macroeconomic balance, taxation, social solidarity*

Abstrak. Ibnu Khaldun dikenal sebagai pemikir Muslim yang memberikan kontribusi besar dalam bidang ekonomi, sosiologi, dan politik. Dalam karya utamanya Muqaddimah, ia mengemukakan gagasan ekonomi yang melampaui zamannya, seperti konsep kekayaan nasional, teori upah, mekanisme pasar, serta peran negara dalam kebijakan fiskal. Penelitian ini bertujuan mengkaji pokok-pokok pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan relevansinya terhadap dinamika ekonomi saat ini. Dengan metode kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, kajian ini menunjukkan bahwa banyak gagasan Khaldun yang masih aktual, terutama terkait pentingnya produktivitas, keadilan fiskal, serta integrasi antara aspek sosial dan ekonomi dalam membangun sistem yang berkelanjutan. Sebagian besar orang tahu bahwa Ibnu Khaldun adalah salah satu pemikir Muslim paling terkenal, dan dia melakukan banyak hal dalam bidang politik, ekonomi, dan sosiologi. Dalam karya monumentalnya, Muqaddimah membahas berbagai konsep ekonomi yang sudah lama ada, seperti mekanisme pasar, teori upah, kekayaan nasional, dan peran negara dalam kebijakan fiskal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari ide-ide yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun tentang ekonomi dan mengevaluasi bagaimana hal-hal ini berdampak pada perkembangan ekonomi kontemporer. Kajian ini menemukan bahwa banyak ide Khaldun masih relevan di zaman sekarang berkat penggunaan metodologi kualitatif deskriptif yang berbasis studi pustaka. Sistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bergantung pada gagasan tentang produktivitas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, keadilan fiskal dalam sistem perpajakan, dan integrasi antara aspek sosial dan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi klasik tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menawarkan solusi untuk banyak masalah ekonomi modern seperti ketimpangan, stagnasi produktivitas, dan krisis institusional.

Kata kunci: Ibnu Khaldun, ekonomi Islam, keseimbangan makro, pajak, solidaritas sosial

Received: April 14, 2025; Revised: April 20, 2025; Accepted: April 30, 2025

**Corresponding author, e-mail address*

PENDAHULUAN

Ibnu Khaldun merupakan salah satu tokoh intelektual Muslim yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam. Lahir pada tahun 1332 M di Tunisia, ia tidak hanya dikenal sebagai sejarawan dan sosiolog, tetapi juga sebagai pelopor dalam pemikiran ekonomi. Melalui karya agungnya *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun memperkenalkan berbagai konsep yang jauh mendahului zamannya, seperti teori siklus negara, pembagian kerja, permintaan dan penawaran, serta pentingnya solidaritas sosial (*'asabiyyah*) dalam membangun peradaban. Meskipun ia hidup dalam masa kemunduran dunia Islam dan penuh konflik politik, pemikirannya tetap relevan hingga kini karena memuat fondasi-fondasi ilmiah yang teruji oleh waktu.

Dalam konteks sejarah pemikiran ekonomi, Ibnu Khaldun sering kali tidak mendapatkan tempat yang layak dibandingkan tokoh-tokoh Barat seperti Adam Smith atau David Ricardo. Padahal, ide-ide yang dikemukakannya banyak mengandung nilai-nilai progresif yang menjadi dasar dalam sistem ekonomi modern. Salah satu gagasan utamanya adalah bahwa kekayaan suatu negara tidak hanya diukur dari kepemilikan logam mulia seperti emas dan perak, melainkan dari tingkat produktivitas masyarakat dan keberhasilan negara dalam menciptakan iklim ekonomi yang adil dan stabil.

Lebih jauh, pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun tidak berdiri sendiri, melainkan berakar dari pengalaman hidupnya sebagai pejabat pemerintahan, guru besar, dan pengamat sosial. Ia hidup dalam lingkungan politik yang tidak stabil, berpindah-pindah dari satu kerajaan ke kerajaan lain, dan menyaksikan secara langsung sebab-sebab kejatuhan berbagai dinasti. Pengalaman ini menjadi dasar dari pemikiran kritisnya tentang siklus kekuasaan, peran negara, pentingnya kepercayaan dalam perdagangan, serta konsep ekonomi berbasis keadilan.

Dalam era modern, di mana dunia dihadapkan pada ketimpangan ekonomi, krisis keuangan, dan tekanan globalisasi, gagasan Ibnu Khaldun kembali menemukan relevansinya. Pemikirannya memberikan kerangka etis dan rasional dalam menilai sistem ekonomi yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun, tidak hanya sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga sebagai landasan konseptual bagi pembangunan ekonomi masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas secara mendalam pokok-pokok pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun, mulai dari konsep kekayaan nasional, teori upah, pajak, mekanisme pasar, hingga

relevansinya dengan ekonomi kontemporer, khususnya dalam konteks Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual yang berarti dalam pengembangan ekonomi Islam yang adaptif terhadap tantangan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*), di mana data dikumpulkan melalui penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber yang digunakan meliputi karya primer Ibnu Khaldun seperti *Muqaddimah*, serta literatur sekunder berupa buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, makalah mahasiswa, dan tulisan blog edukatif yang membahas pemikiran ekonomi Islam. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pokok-pokok pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan menilai relevansinya dalam konteks ekonomi modern, khususnya di Indonesia. Validitas data dijaga dengan melakukan perbandingan antar-sumber serta mengacu pada interpretasi para pakar dalam bidang ekonomi Islam dan sejarah pemikiran ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun mengemukakan beragam konsep ekonomi yang mencerminkan pemahamannya terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi secara menyeluruh. Pemikirannya dituangkan secara sistematis dalam kitab *Muqaddimah*, yang sebenarnya merupakan pengantar dari karya besarnya *Kitab al-‘Ibar*. Dalam *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun tidak hanya mencatat sejarah, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebangkitan dan kehancuran sebuah peradaban, termasuk aspek ekonomi sebagai penopang utama kemajuan sebuah negara.

Dalam *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun membahas semua aspek ekonomi. Dia membahas tentang bagaimana kekayaan berasal, seberapa penting produktivitas tenaga kerja, distribusi pajak yang adil, mekanisme pasar, nilai kerja, dan fungsi negara untuk mengatur ekonomi. Ia berpendapat bahwa sumber utama kekayaan negara adalah produksi barang dan jasa yang berkelanjutan. Kekayaan nasional tumbuh seiring dengan produktivitas masyarakat. Kekayaan ini dapat digunakan untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan kekuasaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa untuk pemerintahan

yang bertahan lama, penerimaan dan pengeluaran negara harus seimbang. Ia memperingatkan bahwa pajak yang terlalu tinggi akan menghilangkan keinginan untuk bekerja dan investasi, yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada penerimaan negara itu sendiri. Gagasan ini kemudian menjadi landasan teori kurva Laffer dalam ekonomi kontemporer. Selain itu, ia menekankan betapa pentingnya pemerintah untuk mengatur pasar tanpa mengganggu kompetisi.

Dinamika ekonomi terkait dengan konsep asabiyyah, atau solidaritas sosial, yang dikemukakan Ibnu Khaldun. Ia percaya bahwa kohesi sosial adalah kunci kepercayaan, kerja sama ekonomi, dan stabilitas politik. Struktur sosial dan kekuatan ekonomi runtuh ketika solidaritas melemah. Ini menunjukkan bahwa pandangan Ibnu Khaldun bahwa moralitas, budaya, dan politik suatu masyarakat terkait satu sama lain.

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun masih sangat relevan untuk zaman sekarang. Konsep seperti produktivitas, keadilan fiskal, peran moderat pemerintah, dan hubungan erat antara sosial dan ekonomi menjadi semakin penting di tengah tantangan globalisasi, ketidaksetaraan ekonomi, krisis fiskal, dan kerusakan institusi. Akibatnya, memahami karya Ibnu Khaldun tidak hanya penting dari perspektif historis, tetapi juga memberikan dasar teoretis yang kuat untuk membangun sistem ekonomi modern yang lebih adil dan berkelanjutan.

Teori- Teori Ibnu Khaldun

1. Kekayaan Nasional

Menurutnya, kesejahteraan suatu negara tidak semata-mata tergantung pada akumulasi emas dan perak, tetapi pada produktivitas tenaga kerja dan kemajuan sektor ekonomi masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun telah melampaui pandangan klasik yang bersifat materialistik, dan mendekati konsep pendapatan nasional modern. Ia menyatakan bahwa semakin produktif tenaga kerja suatu masyarakat, maka semakin besar pula potensi kemakmurannya, Ia mengklaim bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi di bidang-bidang seperti pertanian, perdagangan, kerajinan, dan jasa berkorelasi positif dengan jumlah surplus ekonomi yang dihasilkan, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan umum.

Ibnu Khaldun mengaitkan produktivitas dengan aspek moral dan sosial. Dia berpendapat bahwa masyarakat yang memiliki etos kerja tinggi, solidaritas sosial yang kuat, dan pemerintahan yang adil akan dapat mencapai tingkat produktivitas yang optimal.

Sebaliknya, kemerosotan moral, korupsi, dan ketidakadilan dalam distribusi hasil produksi akan menurunkan keinginan untuk bekerja dan mempercepat kehancuran ekonomi negara. Dengan pemikiran ini, Ibnu Khaldun menempatkan pembangunan ekonomi pada manusia, bukan kekayaan materi. Gagasannya menekankan kualitas sumber daya manusia sebagai komponen penting dalam menciptakan kemakmuran yang berkelanjutan, bukan hanya aspek kuantitatif kekayaan. Oleh karena itu, ide-ide Ibnu Khaldun tentang kekayaan nasional sangat relevan untuk dibahas dalam konteks tantangan pembangunan ekonomi kontemporer, yang semakin menuntut integrasi antara keadilan sosial, produktivitas, dan inovasi.

2. Keseimbangan Ekonomi Makro

Ibnu Khaldun membahas keseimbangan ekonomi makro, di mana ia menyebutkan pentingnya keselarasan antara pendapatan dan pengeluaran dalam suatu negara. Apabila kedua hal ini tidak seimbang, maka akan muncul ketimpangan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, ia seakan meramalkan pentingnya kebijakan fiskal dan moneter seperti yang dikenal dalam teori Keynesian abad ke-20, yang menekankan betapa pentingnya negara mengambil tindakan melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keseimbangan permintaan agregat. Meskipun Ibnu Khaldun hidup jauh sebelum era ekonomi industri dan belum mengenal konsep formal seperti "stimulus fiskal" atau "pengelolaan siklus bisnis", ia telah menemukan prinsip-prinsip dasar yang sama, seperti betapa pentingnya pemerintah mengelola pendapatan, pengeluaran, dan beban pajak secara bijaksana untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Selain itu, studi keseimbangan makroekonomi Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa elemen sosial dan politik tidak dapat dipisahkan dari elemen ekonomi. Ibnu Khaldun percaya bahwa ketidakadilan fiskal dan ketimpangan ekonomi tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi juga menghancurkan kohesi sosial dan mempercepat keruntuhan peradaban. Menurutnya, keseimbangan ekonomi melibatkan faktor ekonomi, sosial, moral, dan politik secara bersamaan. Pendekatan ini masih relevan untuk digunakan dalam memahami dan merancang kebijakan ekonomi kontemporer.

3. Teori Upah dan Pembagian Kerja

Ibnu Khaldun juga membahas secara tajam teori upah dan pembagian kerja. Ia mengakui bahwa upah dipengaruhi oleh permintaan terhadap keahlian tertentu serta tingkat pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Dalam hal ini, ia memahami pentingnya spesialisasi dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, serta menjelaskan bahwa upah yang terlalu rendah akan menyebabkan produktivitas menurun, sedangkan upah yang terlalu tinggi tanpa disertai peningkatan produktivitas akan membebani sektor usaha, untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi, Ibn Khaldun menekankan pentingnya pembagian kerja. Menurutnya, spesialisasi memungkinkan orang untuk berkonsentrasi pada bidang tertentu sesuai dengan keahlian mereka, yang mempercepat proses produksi, meningkatkan kualitas hasil kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat bahwa masyarakat yang dapat membangun sistem pembagian kerja yang efektif akan lebih menguntungkan daripada masyarakat yang masih bergantung pada produksi individual atau subsisten.

Dengan demikian, analisis Ibnu Khaldun mengenai upah dan pembagian kerja tidak hanya bersifat teknis ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan moral. Ini menunjukkan betapa pendekatan holistik yang digunakannya, karena Ibnu Khaldun mengaitkan struktur upah dan pembagian kerja dengan kestabilan sosial dan percaya bahwa keadilan dalam sistem upah merupakan komponen penting dalam menjaga keharmonisan sosial, mencegah ketimpangan yang ekstrem, dan mempertahankan solidaritas masyarakat.

4. Perdagangan Internasional

Dalam perdagangan internasional, Ibnu Khaldun menekankan perlunya keadilan, transparansi, dan kepercayaan antara pelaku ekonomi. Ia mengkritik praktik monopoli dan intervensi pasar yang tidak sehat karena akan mematikan inovasi dan semangat kewirausahaan. Gagasannya ini senada dengan semangat ekonomi pasar bebas yang tetap dikendalikan oleh prinsip etika dan moral. Namun, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kebebasan pasar harus selalu berada dalam koridor moralitas dan keadilan sosial. Dengan kata lain, mekanisme pasar boleh bekerja untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi, tetapi perlu ada pengawasan terhadap praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Selain itu, Ibnu Khaldun menyadari bahwa kepercayaan merupakan aset yang lebih penting daripada kekayaan materi dalam perdagangan antarbangsa. Jika tidak ada kepercayaan, biaya transaksi akan meningkat, risiko perdagangan akan meningkat, dan hubungan ekonomi global akan menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, mempertahankan integritas perdagangan bukan hanya masalah etika tetapi juga cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas dalam jangka panjang.

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang perdagangan internasional menunjukkan betapa cerdasnya dia dalam memahami dinamika ekonomi global jauh sebelum zamannya. Sampai hari ini, ide-idenya masih relevan di tengah kompleksitas globalisasi dan masalah keadilan dalam sistem perdagangan global.

5. Uang dan Sistem Moneter

Terkait uang dan sistem moneter, Ibnu Khaldun menganggap uang bukan sebagai tujuan utama, melainkan sebagai alat untuk mencapai kemakmuran. Ia mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar nilai karena kestabilannya. Namun, ia juga membuka kemungkinan evolusi sistem uang, yang secara tidak langsung telah memprediksi munculnya uang kertas dan sistem fiat yang berkembang saat ini. Ibnu Khaldun juga menunjukkan pemahaman bahwa sistem moneter selalu berubah dan dapat berubah seiring waktu. Meskipun ia hidup di era di mana uang fisik berbasis logam dominan, ia menyadari bahwa nilai uang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap media yang digunakan sebagai alat tukar. Dengan mengakui bahwa stabilitas dan legitimasi sosial penting untuk penggunaan uang, Ibnu Khaldun secara tidak langsung membuka jalan bagi evolusi sistem moneter di luar emas dan perak. Intuisi ini kemudian terbukti dalam munculnya uang kertas (atau uang kertas) dan sistem fiat kontemporer, di mana nilai uang tidak lagi didasarkan pada cadangan logam mulia, tetapi pada kepercayaan terhadap otoritas penerbit, seperti bank sentral.

Lebih jauh, Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa perubahan sistem moneter yang salah, seperti pencetakan uang yang berlebihan atau perubahan nilai secara sepihak, dapat membahayakan ekonomi. Risiko nyata yang dapat mengancam stabilitas ekonomi dan sosial termasuk inflasi, penurunan daya beli, dan penurunan kepercayaan masyarakat

terhadap mata uang. Akibatnya, ia menekankan pentingnya etika dan kehati-hatian dalam mengelola sistem moneter.

Penelitian Ibnu Khaldun menunjukkan betapa luas perspektifnya terhadap ekonomi, yang mencakup aspek teknis, sosial, dan moral. Hingga hari ini, gagasan-gagasannya masih relevan, terutama dalam hal pentingnya mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan modern dan menjaga stabilitas nilai mata uang di tengah tantangan globalisasi dan inovasi keuangan digital.

6. Pajak dan Peran Negara

Ibnu Khaldun pun mengemukakan pandangan progresif mengenai pajak dan peran negara. Ia memperingatkan bahwa beban pajak yang berlebihan akan merusak semangat usaha dan mendorong masyarakat untuk menghindari dari aktivitas ekonomi formal. Sebaliknya, pajak yang wajar akan mendorong produktivitas dan memperluas basis pajak secara alami. Hal ini sangat sejalan dengan konsep modern tentang kurva Laffer dan kebijakan pajak yang bersifat insentif. Ia percaya bahwa fungsi negara tidak hanya sebagai pemungut pajak tetapi juga sebagai penyedia kemakmuran bagi rakyat. Negara bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang bijak, menjaga ketertiban umum, melindungi hak milik, dan menjamin distribusi keadilan dalam sistem sosial dan ekonomi. Negara yang tidak melakukannya atau yang tergoda untuk meningkatkan kekayaan negara melalui pajak yang menindas akan cepat mengalami kemunduran, baik secara ekonomi maupun politik.

Pandangan Ibnu Khaldun tentang pajak dan peran negara ini menunjukkan betapa cermat dan mendalam dia mempelajari hubungan antara perilaku ekonomi masyarakat dan kebijakan publik. Gagasan ini tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga menjadi dasar bagi teori fiskal kontemporer, terutama di era saat banyak negara berkembang dan maju berfokus pada optimalisasi pajak dan menciptakan iklim usaha yang menguntungkan. Oleh karena itu, ide-ide Ibnu Khaldun masih menjadi rujukan penting dalam percakapan tentang cara membuat sistem pajak yang adil, produktif, dan berkelanjutan.

7. Moral dan Spiritual

Akhirnya, pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun tidak hanya terbatas pada teori, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Ia meyakini bahwa kesejahteraan hanya dapat

dicapai apabila pemerintah dan masyarakat memegang prinsip keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial., Ibnu Khaldun menekankan bahwa solidaritas sosial (*asabiyyah*) adalah kekuatan yang dapat mendorong kemajuan peradaban. Ia berpendapat bahwa semangat kebersamaan, saling membantu, dan kepedulian sosial akan memperkuat kohesi masyarakat dan menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat. Jika solidaritas melemah karena kerakusan atau individualisme ekstrem, tatanan ekonomi pun menjadi rapuh dan rentan terhadap kehancuran.

Dari perspektif spiritual, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kesadaran akan tanggung jawab moral di hadapan Tuhan harus menentukan perilaku ekonomi yang baik. Aktivitas seperti perdagangan, produksi, dan konsumsi seharusnya dilakukan bukan hanya untuk keuntungan materi, tetapi juga untuk beribadah dan membantu orang lain. Oleh karena itu, ia menganjurkan etika ekonomi yang terdiri dari prinsip-prinsip seperti kejujuran dalam transaksi, perlindungan hak-hak pekerja, dan penolakan praktik riba.

Menurut perspektif ini, Ibnu Khaldun menganggap ekonomi sebagai bagian dari upaya untuk membangun masyarakat yang bermoral, adil, dan berkeadaban tinggi. Dengan menggabungkan rasionalitas ekonomi dan spiritualitas, dia menawarkan model ekonomi yang holistik dan berkelanjutan, yang masih relevan di tengah tantangan kapitalisme kontemporer yang seringkali mengabaikan aspek moral.

Kesimpulan

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun merupakan warisan intelektual yang tidak hanya berharga dalam konteks sejarah Islam, tetapi juga memiliki relevansi kuat terhadap tantangan ekonomi masa kini. Melalui *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun telah mengembangkan konsep-konsep ekonomi yang jauh melampaui zamannya, seperti teori pendapatan nasional, keseimbangan ekonomi makro, dinamika permintaan dan penawaran, serta pentingnya peran negara dalam menjaga keadilan ekonomi.

Konsep kekayaan menurut Ibnu Khaldun tidak diukur dari akumulasi emas dan perak, tetapi dari produktivitas masyarakat dan efektivitas kerja. Ia juga menekankan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh solidaritas sosial (*‘asabiyyah*), sistem pajak yang adil, serta mekanisme pasar yang bebas dari praktik monopoli dan intervensi berlebihan.

Pemikiran ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan konteks ekonomi Indonesia, khususnya dalam hal pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, pengembangan sektor riil, serta kebijakan fiskal yang inklusif dan adil. Ibnu Khaldun juga memberikan pandangan yang utuh tentang pentingnya keadilan sosial sebagai fondasi ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kajian atas pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam, tetapi juga memberikan dasar normatif dan praktis dalam merancang sistem ekonomi yang adil, stabil, dan adaptif terhadap dinamika global.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R. B. M., Mat Teh, K. S. bin, & Amrullah, M. (2018). Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Strategi Pelaksanaan Iklim Dini Di Sekolah. *Pedagogia : Jurnal Pendidikan*, 7(2), 137-144. <https://doi.org/10.21070/pedagogia.v7i2.1606>
- Choirul Huda, Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam, Ibnu Khaldun, Mei 2013, Volume ekonomi Islam, 4, 103-107.
- Gusfira, A., Bunaia, A., Sinka, V., & Zein, A. W. (2024). Pengaruh Pemikiran Ibnu Khaldun
- Huda, C. (2013). Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibn Khaldun. *Economica Jurnal*
- Ibnu Khaldun, Kitab al-‘Ibar (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 1084-1087.
- Islam Ibnu Khaldun: Sebuah Pendekatan Sosio Historis." *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Islam*, 1(4), 295-301.
- IV, 116 – 117. *Journal of Management and Accounting*, 4(2). 429-433.
- Justice and Welfare for Indonesia 10(1): 113-130.
- Kotimah, & A'yun, N. (2023). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun. *IJMA (Indonesian*
- Maleha, N. Y. (2016). Studi pemikiran Ibn Khaldun tentang ekonomi Islam. *Economica Sharia*,
- Muh. Ilham (2016), Konsep ‘Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, *Jurnal Politik Profetik*, 4(1), 7-12.
- Raihan Bin Mohd Arifin, Kamarul Shukri bin Mat Teh, Norhisham Muhamad, Muhlasin Amrullah
- Ridwan, Mohammad, Abdul Ghofur, Rokhmadi, dan Gama Pratama. 2022. "Pemikiran Ekonomi terhadap Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan*
- Zubair. (2006). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Khaldun. *Al-Turas*, 12(1), hal 43-45